

pemantauan. Adanya verifikasi data kepegawaian, pemeriksaan dokumen secara berjenjang, pemisahan tugas sesuai kewenangan, koordinasi antarbagian, dan pengawasan oleh pimpinan mampu meminimalkan risiko kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam proses penggajian sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja pegawai.

3. Ketepatan penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang telah tercapai dengan baik. Ketepatan tersebut ditunjukkan melalui tiga aspek utama, yaitu ketepatan waktu pembayaran, ketepatan jumlah gaji yang diterima pegawai sesuai haknya, serta ketepatan administrasi dalam setiap tahapan penggajian. Keberhasilan tersebut didukung oleh validitas data kepegawaian, penggunaan aplikasi Gaji Web dan SAKTI, verifikasi dokumen sebelum pembayaran, serta koordinasi yang baik antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses penggajian.
4. Sistem akuntansi penggajian dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki peran yang saling melengkapi dalam mewujudkan ketepatan penggajian pegawai. Sistem akuntansi penggajian berperan dalam menyediakan informasi penggajian yang akurat melalui prosedur yang terstruktur dan pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan SPIP memastikan bahwa seluruh proses tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan melalui mekanisme pengendalian, verifikasi, dan pengawasan yang berkesinambungan. Sinergi kedua aspek tersebut menghasilkan proses penggajian yang tepat waktu, tepat jumlah, tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, ketepatan penggajian pegawai di Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem akuntansi penggajian, tetapi juga oleh efektivitas penerapan SPIP dalam setiap tahapan pengelolaan penggajian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Sistem Pengendalian Intern dalam Ketepatan Penggajian Pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, reduksi data, coding, analisis tema, dan triangulasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem akuntansi penggajian pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem akuntansi penggajian. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pembagian fungsi yang jelas antara Pengelola Kepegawaian, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran, dan Kepala Cabang. Proses penggajian juga didukung oleh penggunaan aplikasi Gaji Web dan SAKTI yang mampu menghasilkan informasi penggajian secara lebih akurat, efisien, dan terdokumentasi. Dengan demikian, sistem akuntansi penggajian yang diterapkan telah memenuhi unsur fungsi, prosedur, dokumen, dan sistem informasi sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2016) serta Romney dan Steinbart (2018).
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam proses penggajian telah berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Hal ini tercermin dari penerapan lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan penggajian melalui aplikasi Gaji Web dan SAKTI yang didukung oleh penerapan SPIP secara konsisten merupakan faktor utama yang mendukung terwujudnya ketepatan penggajian pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang. Temuan ini memberikan gambaran bahwa integrasi antara sistem akuntansi penggajian berbasis teknologi dan sistem pengendalian intern yang efektif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan belanja pegawai yang akuntabel, transparan, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Sistem Akuntansi Penggajian dan Sistem Pengendalian Intern dalam Ketepatan Penggajian Pegawai pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang

Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang diharapkan dapat terus mempertahankan penerapan sistem akuntansi penggajian yang telah berjalan dengan baik melalui penggunaan aplikasi Gaji Web dan SAKTI. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap prosedur penggajian perlu terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi maupun pembaruan sistem aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penggajian tetap berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Bagi Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

Pengelola Kepegawaian dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPAPB) disarankan untuk terus meningkatkan ketelitian dalam melakukan pembaruan data kepegawaian serta verifikasi dokumen pendukung penggajian. Pembaruan data yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat akan meminimalkan risiko kesalahan dalam penghitungan gaji serta mendukung ketepatan pembayaran hak pegawai.

3. Bagi Pimpinan Instansi

Pimpinan instansi diharapkan terus memperkuat pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada aspek pemantauan dan evaluasi terhadap proses penggajian. Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu mendeteksi potensi kesalahan administrasi maupun kendala dalam pelaksanaan penggajian sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan sebelum memengaruhi ketepatan pembayaran gaji pegawai.

4. Bagi Pegawai

Pegawai diharapkan berperan aktif dalam mendukung kelancaran proses penggajian dengan segera melaporkan setiap perubahan data kepegawaian, seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan status keluarga, maupun perubahan data lainnya yang berpengaruh terhadap hak keuangan. Ketepatan dan kelengkapan informasi yang disampaikan akan mendukung akurasi data penggajian dan meminimalkan terjadinya kesalahan administrasi.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah, yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh instansi pemerintah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa satuan kerja pemerintah atau instansi yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem akuntansi penggajian dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain, seperti efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, atau manajemen risiko dalam pengelolaan penggajian sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.